

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO *n*ext

Edisi 50
Maret 2023



10:00

5G



Penataan Frekuensi:

Tingkatkan Kualitas
Layanan Telekomunikasi

TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Pemimpin Redaksi:
Rhina Anita

Wakil Pemimpin Redaksi:
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Desideramus Bitan
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Dhenty Febrina Sahara
Annas Yudistira Saputra

Produksi:
Fahmie Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta Pusat

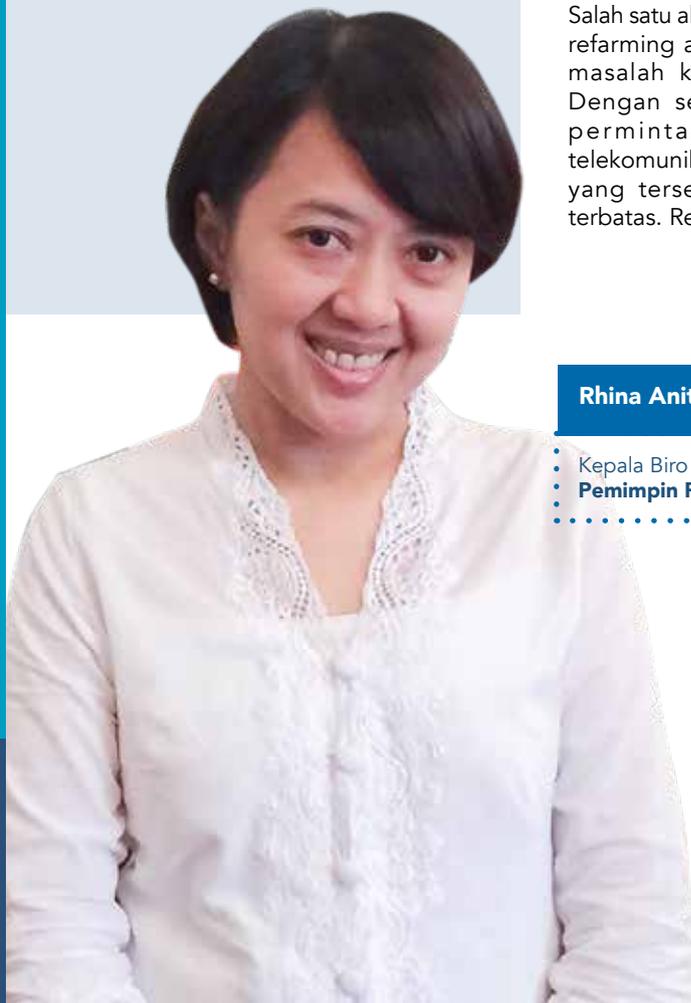
Refarming, Penataan Ulang Frekuensi untuk Kualitas Layanan Telekomunikasi

Selamat bertemu kembali rekan-rekan pembaca dalam KominfoNext edisi ke-51. Edisi kali ini mengangkat tema seputar proses refarming atau penataan ulang frekuensi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kami mengupas secara mendalam tentang apa itu refarming, mengapa prosesnya begitu penting, dan bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kita.

Refarming frekuensi adalah sebuah

proses penting yang dilakukan oleh regulator telekomunikasi untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi radio. Kita mungkin tidak menyadari seberapa penting peran spektrum frekuensi radio dalam kehidupan kita sehari-hari. Frekuensi radio digunakan untuk berbagai layanan, termasuk telekomunikasi seluler, radio, televisi, satelit, dan bahkan internet. Oleh karena itu, penataan ulang frekuensi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas layanan yang kita nikmati.

Salah satu alasan utama dilakukannya refarming adalah untuk mengatasi masalah kekurangan spektrum. Dengan semakin meningkatnya permintaan untuk layanan telekomunikasi, spektrum frekuensi yang tersedia menjadi semakin terbatas. Refarming memungkinkan



Rhina Anita

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next

regulator untuk mengalokasikan spektrum frekuensi dengan lebih efisien sehingga lebih banyak layanan dapat diakomodasi tanpa mengorbankan kualitas.

Selain itu, refarming juga dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan. Dengan menata ulang frekuensi, operator jaringan dapat mengurangi gangguan dan interferensi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas sinyal dan mengurangi gangguan yang tidak diinginkan.

Refarming frekuensi adalah kesempatan untuk menghadirkan teknologi baru dan inovasi dalam layanan telekomunikasi. Refarming frekuensi dapat memengaruhi layanan telekomunikasi yang kita nikmati sehari-hari. Misalnya, dalam industri telepon seluler, refarming dapat berdampak pada cakupan jaringan, kecepatan data, dan kemampuan jaringan untuk mengatasi lalu lintas yang padat.

Begitupun bagi industri penyiaran. Sebagian besar saluran televisi dan stasiun radio menggunakan spektrum frekuensi tertentu untuk menyiarkan siaran mereka. Dengan refarming, beberapa saluran mungkin perlu berpindah ke frekuensi yang berbeda. Ini dapat memiliki dampak signifikan terutama pada stasiun yang sudah mapan. Bagaimana industri ini menangani perubahan ini adalah hal yang menarik untuk diikuti.

Selamat membaca!

Dengan menata ulang frekuensi, operator jaringan dapat mengurangi gangguan dan interferensi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas sinyal dan mengurangi gangguan yang tidak diinginkan.

Presiden Jokowi Apresiasi Dukungan Singapura atas Keketuaan Indonesia di ASEAN

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga membahas mengenai komitmen kedua negara dalam menyelesaikan isu di kawasan Asia Tenggara.



Presiden Joko Widodo meninjau lokasi Istana Kepresidenan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Kamis, 23 Februari 2023. Foto: BPMI Seta Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong mengadakan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Singapura, pada Kamis, 16 Maret 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas dukungan Singapura terhadap Indonesia yang saat ini tengah memegang keketuaan ASEAN. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangan pers bersama yang diselenggarakan usai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, di Istana Kepresidenan Singapura, pada hari Kamis, 16 Maret 2023.

“Saya menyampaikan penghargaan atas dukungan Singapura terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN,” ucap Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan beberapa prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN, di antaranya adalah untuk menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN.

“Prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN adalah menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyatnya dan bagi dunia, menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN sehingga tetap menjadi motor perdamaian dan stabilitas di kawasan, dan menjadikan Asia Tenggara tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga membahas mengenai komitmen kedua negara dalam menyelesaikan isu di kawasan Asia Tenggara. Presiden Jokowi menyebut Indonesia akan mendorong langkah implementasi five points consensus atau lima poin kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam penyelesaian isu Myanmar.

“Terkait Myanmar, sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan mendorong langkah maju implementasi five points consensus terkait engagement dengan semua pihak untuk membuka jalan dengan dilakukannya dialog nasional yang inklusif, kemudian menekankan pentingnya pengurangan ketegangan dan kekerasan, serta memastikan bantuan kemanusiaan akan menjangkau semua pihak yang memerlukan,” tegasnya.

Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong juga menekankan bahwa Singapura akan terus bekerja sama bersama seluruh anggota ASEAN untuk mendorong implementasi secara penuh lima poin kesepakatan tersebut.



“Singapura akan terus bekerja dengan Indonesia dan dengan anggota ASEAN, ditambah dengan mitra ASEAN seperti PBB, untuk mendorong implementasi penuh dari lima poin kesepakatan,” jelas PM Lee.

Selain itu, PM Lee juga menuturkan bahwa Singapura dan Indonesia serta seluruh anggota ASEAN akan terus bekerja sama mengawal Timor-Leste sebagai anggota ASEAN.

“Kami juga akan bekerja dengan Indonesia dan anggota ASEAN dalam peta jalan untuk keanggotaan ASEAN Timor-Leste, dan melakukan bagian kami untuk membantu Timor-Leste mempersiapkan kewajiban dan komitmen yang akan diambil ketika bergabung dengan ASEAN,” ucapnya.

(BPMI Setpres)



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Jumat, 24 Maret 2023. Foto: BPMI Setpres

Jumlah Pemudik Diprediksi Meningkat, **Pemerintah Tambah Cuti Bersama**

Dalam keterangannya selepas ratas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa akan terjadi kenaikan pemudik dari 85 juta orang menjadi 123 juta orang pada lebaran tahun ini.

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) terkait persiapan arus mudik lebaran tahun 2023 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 24 Maret 2023. Dalam keterangannya selepas ratas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa akan terjadi kenaikan pemudik dari 85 juta orang menjadi 123 juta orang pada lebaran tahun ini.

"Untuk di Jabodetabek dari 14 juta menjadi 18 juta. Artinya terjadi kenaikan 47 persen untuk nasional dan 27 persen untuk Jabodetabek," ujar Budi.

Berdasarkan data tersebut, Budi menyebut bahwa pemerintah memutuskan untuk menambah cuti bersama mulai dari tanggal 19 April 2023. Langkah tersebut diambil pemerintah untuk mengakomodasi waktu bagi para pemudik dan mencegah terjadinya penumpukan di jalur-jalur mudik.

"Kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan liburnya maju 2 hari. Jadi mulai tanggal 19 sudah libur, 20 sudah libur, tapi masuknya 26. Jadi tambah 1 hari tapi di depan maju 2 hari," ungkap Budi.

Budi juga menyebut bahwa keputusan tersebut diambil pemerintah setelah melalui pembahasan yang cukup efektif. Ia pun telah ditugaskan oleh Presiden untuk segera menindaklanjuti hasil ratas tersebut kepada sejumlah kementerian terkait.

"Karena diputuskan dalam ratas, ini secara de facto sudah terjadi, tinggal de jure kami akan mengusulkan usulan kepada Pak Presiden dan saya rasa kami akan berapat dengan tiga kementerian tersebut," ucap Budi.

Dalam kesempatan tersebut, Budi turut menegaskan kepada para pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) lebih awal kepada para pegawainya. Hal tersebut bertujuan agar para pegawai sudah mendapatkan THR sebelum melakukan mudik lebaran.

"Satu hal yang kita imbau terutama berkaitan dengan swasta agar memberikan THR lebih awal sehingga pada saat tanggal 18 dipastikan mereka sudah terima THR dan mereka bisa melakukan suatu perjalanan mulai 18 malam," tutur Budi.

(BPMI Setpres)



Serahkan Penghargaan Penanganan Covid-19, Presiden: Mari Lanjutkan Pengabdian

Presiden menilai bahwa seluruh komponen bangsa telah bekerja keras melampaui tugas dan fungsinya dalam menangani Covid-19.



Presiden Joko Widodo mengapresiasi seluruh jajarannya yang telah bekerja keras dalam menangani permasalahan Covid-19 di Tanah Air. Presiden mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus melanjutkan keberhasilan penanganan Covid-19 ke berbagai masalah kemanusiaan dan kebangsaan.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya saat menghadiri acara Penyerahan Penghargaan Penanganan Covid-19, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin, 20 Maret 2023.

“Marilah pengabdian ini terus kita lanjutkan untuk memecahkan berbagai masalah-masalah kemanusiaan dan kebangsaan dan membangun Indonesia menjadi negara maju,” ucap Presiden.

Presiden menilai bahwa seluruh komponen bangsa telah bekerja keras melampaui tugas dan fungsinya dalam menangani Covid-19. Presiden menekankan, sinergi antarpemerintah dan partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu hal penting untuk menghadapi berbagai masalah.

“Kita harus terus bergerak sinergis mengerahkan kekuatan seluruh komponen bangsa, sinergi dari pemerintah pusat sampai ke tingkat desa, sinergi lintas kementerian, sinergi lintas lembaga, sinergi lintas sektor, dan sinergi antarlembaga negara, pemerintah, DPR, BPK dan lembaga-lembaga lain, serta sinergi antara pemerintah dan partisipasi masyarakat,” tutur Kepala Negara.

Selanjutnya, Presiden mengatakan bahwa keberhasilan penanganan masalah Covid-19 menunjukkan kekuatan Indonesia sebagai bangsa besar sehingga harus terus dilanjutkan untuk menangani penyakit lainnya.

“Kekuatan ini bukan hanya bisa digunakan untuk semua agenda besar bangsa tapi juga kita bisa gunakan untuk menangani penyakit-penyakit yang lainnya, misalnya TBC, hati-hati, stunting,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden pun meyakini bahwa permasalahan besar lainnya dapat diselesaikan apabila cara kerja dalam menghadapi masalah Covid-19 terus diimplementasikan.

“Kalau kita bekerjanya seperti dalam penanganan Covid, masalah-masalah besar sebetulnya sangat cepat bisa kita selesaikan, dengan catatan kita bekerja seperti kita dalam menangani Covid, mengatasi Covid,” tandas Presiden.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.



Presiden Dorong Transformasi Reformasi Birokrasi Lebih Lincah Layani Masyarakat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyederhanaan sejumlah sektor birokrasi agar lebih cepat dan mudah, seperti dalam bidang kepegawaian.



dalam melayani masyarakat dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyederhanaan sejumlah sektor birokrasi agar lebih cepat dan mudah, seperti dalam bidang kepegawaian.

“Sekarang dari sebelas proses, kita pangkas bisnis prosesnya cukup tiga saja. Sehingga untuk mengurus kenaikan pangkat, mutasi sekarang sudah jauh lebih mudah,” kata Anas dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 2 Maret 2023.

Dalam hal reformasi birokrasi (RB), Anas menjelaskan bahwa reformasi birokrasi saat ini harus berdampak terhadap daerah. Anas mencontohkan, belanja produk dalam negeri lewat e-katalog lokal yang tinggi akan berpengaruh terhadap indeks reformasi birokrasi di daerah tersebut.

“Jadi daerah yang belanja katalog lokalnya tinggi lewat e-katalog lokal, nilai RB-nya pasti naik akan lebih bagus,” ujarnya.

Kemudian, terkait sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE), Anas mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya mempersiapkan sistem tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Menurut Anas, hal tersebut penting karena nilai SPBE yang baik akan berdampak terhadap penilaian lainnya mulai dari indeks persepsi korupsi hingga indeks penegakan hukum.

“Kalau nilai SPBE-nya bagus ini paralel dengan indeks persepsi korupsinya pasti bagus, yang kedua tingkat kemudahan berusahanya pasti bagus, yang ketiga indeks penegakan hukum atau rule of law-nya juga bagus,” lanjutnya.

Anas melanjutkan, dalam jangka pendek masyarakat dapat mulai merasakan SPBE melalui mal pelayanan publik (MPP) secara digital. Dengan adanya MPP digital ini, MenPAN-RB berharap masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan atau dokumen lainnya dari semua tempat.



“Misalnya ada (yang) rumahnya Boyolali, ke depan ngurus tidak harus pulang ke Boyolali. Ke depan kalau sudah ngurus di IKD, indeks kependudukan digital, maka cukup ngurus dari Jakarta,” ucap Anas.

Lebih lanjut, MenPAN-RB menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah meminta seluruh kementerian/lembaga untuk mengintegrasikan layanan masing-masing melalui SPBE.

“Selama ini setiap inovasi ada satu inovasi, maka satu inovasi satu aplikasi. Ini akan banyak akun yang harus dibuat oleh rakyat untuk mendapatkan pelayanannya. Terkait dengan ini sekarang ada 27 ribu lebih aplikasi, ke depan akan terintegrasi lewat sistem pemerintah berbasis elektronik,” tandasnya.

5G

Teknologi & Gadget



Indonesia telah memasuki babak baru teknologi informasi. Sejak Mei 2021, jaringan seluler 5G mulai beroperasi secara komersial di seluruh Indonesia. Jaringan bergerak seluler 5G yang beroperasi perdana tersebut berbasis teknologi IMT-2020 (International Mobile Telecommunications-2020) pada pita frekuensi 2.300 MHz atau 2,3 GHz.

Layanan jaringan 5G ini juga menandai tahapan operasi simultan 4G dan 5G di tanah air. Dengan demikian, kehadiran layanan 5G tidak lantas menggusur layanan 4G yang sudah digunakan masyarakat. Pasalnya, dalam tahapan pengembangan awal tersebut, jaringan 4G juga dibutuhkan sebagai basis operasionalisasi 5G.

Sebagai teknologi baru, jaringan 5G tentunya akan semakin mendorong kemajuan sektor digital Indonesia. Yang pasti, layanan 5G lebih cepat dan kapasitas jaringan lebih besar sekaligus andal dibandingkan jaringan 4G. Di samping itu, teknologi 5G akan membuka potensi layanan tidak hanya untuk komunikasi antar manusia (human-to-human), tetapi juga mengintegrasikan jaringan manusia dengan mesin (human-to-machine) dan juga jejaring komunikasi machine-to-machine.

Kehadiran teknologi 5G membuat banyak perangkat dan bidang industri mengalami perubahan besar dalam hal konektivitas, kecepatan, dan efisiensi.

Agar layanan 5G lebih optimal, Indonesia membutuhkan alokasi spektrum frekuensi setidaknya di tiga layer lapisan, yaitu low band, middle band, dan high band. Teknologi 5G merupakan teknologi yang sangat fleksibel. Artinya, teknologi itu dapat diterapkan untuk jenis layanan Mobile Broadband maupun Fixed Broadband atau Fixed Wireless Access (FWA).

Kehadiran teknologi 5G membuat banyak perangkat dan bidang industri mengalami perubahan besar dalam hal konektivitas, kecepatan, dan efisiensi. Teknologi 5G memungkinkan pengiriman data yang lebih cepat, keterhubungan yang lebih baik antara perangkat, serta mendukung aplikasi yang lebih canggih.

Berikut adalah beberapa contoh industri yang terus mengembangkan layanannya dengan teknologi 5G:

1 Drone Industri

Drone yang digunakan dalam berbagai industri, seperti pertanian, pemetaan, pemantauan infrastruktur, dan pengiriman, telah memanfaatkan teknologi 5G. Koneksi 5G memberikan drone kemampuan untuk mengirimkan data dengan cepat, menerima perintah dalam waktu nyata, dan melakukan tugas dengan lebih efisien.

2 Kamera Keamanan Pintar

Kamera keamanan pintar yang mendukung 5G memungkinkan pemantauan video yang lebih tinggi resolusi dan real-time. Ini memungkinkan sistem keamanan untuk memberikan respons yang lebih cepat terhadap situasi darurat.

3 Robot Industri

Robot yang digunakan dalam manufaktur, logistik, dan perawatan kesehatan semakin mengadopsi teknologi 5G. Koneksi 5G memungkinkan robot untuk mengoperasikan sendiri dengan lebih baik dan berkomunikasi dengan sistem lain dalam ekosistem produksi.

4 Konsol Game Streaming

Konsol game yang mendukung layanan streaming permainan berbasis cloud, seperti Google Stadia, memanfaatkan jaringan 5G untuk menghadirkan pengalaman bermain game yang lancar tanpa perlu perangkat keras yang kuat.

5 Perangkat Medis

Peralatan medis seperti mesin pencitraan berbasis 5G dapat mengirimkan data gambar medis dalam waktu nyata untuk diagnosis dan perawatan yang lebih cepat. Selain itu, perangkat medis dapat berkomunikasi dengan dokter dan sistem perawatan kesehatan dengan latency yang rendah.

6 Kendaraan Terhubung (Connected Vehicles)

Mobil dan kendaraan komersial yang dilengkapi dengan teknologi 5G dapat berkomunikasi dengan jaringan jalan raya dan antara satu sama lain untuk meningkatkan keamanan lalu lintas dan efisiensi transportasi.

7 Pompa Bensin Pintar

Beberapa stasiun pengisian bahan bakar telah dilengkapi dengan peralatan 5G yang memungkinkan transaksi pembayaran yang lebih cepat, pemantauan bahan bakar secara real-time, dan penyediaan layanan yang lebih baik kepada pelanggan.

8 Gadget IoT

Berbagai perangkat Internet of Things (IoT), seperti sensor lingkungan, termometer pintar, dan pengunci pintu pintar, dapat memanfaatkan 5G untuk mengirimkan data mereka ke cloud atau ke perangkat pengguna dengan cepat dan efisien.

9 Alat Konstruksi Pintar

Peralatan konstruksi seperti ekskavator, bulldozer, dan truk pembawa material yang terhubung dengan 5G dapat dikelola dan dipantau dari jarak jauh, meningkatkan produktivitas dan keselamatan di lokasi konstruksi.

10 Gaming Mobile

Perangkat gaming mobile yang mendukung jaringan 5G dapat memberikan pengalaman bermain game yang lebih mulus dengan latensi yang rendah, memungkinkan pemain untuk bersaing dalam permainan online yang serba cepat.

Pemanfaatan jaringan telekomunikasi 5G terus berkembang dan membawa perubahan signifikan dalam cara kita berinteraksi dengan perangkat, layanan, dan dunia di sekitar kita. Penggunaan perangkat 5G diyakini akan memberikan potensi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pengalaman pengguna dalam berbagai sektor, dan hal ini terus berkembang seiring dengan peningkatan infrastruktur jaringan 5G di seluruh dunia.



Refarming: Optimalisasi Sumber Daya Frekuensi untuk Telekomunikasi Modern

Spektrum frekuensi menjadi komoditas yang sangat berharga. Frekuensi radio digunakan untuk berbagai layanan, termasuk telekomunikasi seluler, televisi, dan radio. Salah satu upaya penting dalam pengelolaan frekuensi adalah penataan ulang frekuensi atau refarming.

Penataan ulang frekuensi adalah proses yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi yang tersedia. Hal ini dilakukan dengan cara mengalokasikan ulang frekuensi yang sudah ada agar dapat digunakan lebih efisien.

Di Indonesia, pengelolaan frekuensi ini menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama operator telekomunikasi.



Apa Itu Refarming?

Penataan ulang frekuensi, atau dikenal juga sebagai refarming, merujuk pada upaya restrukturisasi penggunaan spektrum frekuensi dalam komunikasi nirkabel. Ini termasuk realokasi, reorganisasi, atau pengalokasian ulang frekuensi yang sudah ada untuk meningkatkan penggunaan yang lebih efisien dan memenuhi tuntutan layanan yang semakin berkembang.

Penataan ulang frekuensi bukanlah hal baru dalam dunia telekomunikasi. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam kebutuhan layanan, penting untuk terus mengadaptasi alokasi frekuensi agar sesuai dengan perkembangan zaman. Penataan ulang ini seringkali menjadi jawaban atas perubahan-perubahan ini.

Bagaimana Proses Refarming Dilakukan?

Proses penataan ulang frekuensi melibatkan beberapa tahapan yang cermat. Berikut adalah langkah-langkah utama yang biasanya terlibat:

Penentuan Tujuan: Tahap awal melibatkan pemerintah atau badan regulasi yang relevan, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Indonesia. Mereka menentukan tujuan dari penataan ulang frekuensi, seperti peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas layanan, atau pengalokasian frekuensi untuk layanan baru.

Analisis Spektrum yang Tersedia: Badan regulasi dan operator telekomunikasi bersama-sama melakukan analisis terhadap spektrum frekuensi yang tersedia. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang spektrum yang sudah dialokasikan, termasuk penggunaannya oleh operator dan layanan yang ada.

Konsultasi dengan Pihak Terkait: Operator telekomunikasi yang terpengaruh oleh penataan ulang frekuensi diajak untuk berpartisipasi dalam proses ini. Mereka memberikan masukan tentang alokasi frekuensi yang diinginkan dan berbagi data penggunaan frekuensi saat ini.

Penentuan Alur Alokasi: Berdasarkan masukan dari operator dan hasil analisis, badan regulasi menentukan alur alokasi frekuensi baru. Ini melibatkan pembagian frekuensi untuk berbagai layanan seperti telepon seluler, internet, radio, dan televisi.

Perizinan: Operator telekomunikasi yang terlibat kemudian memperoleh perizinan untuk menggunakan frekuensi yang telah dialokasikan ulang. Ini termasuk pemenuhan persyaratan teknis dan pembayaran biaya yang relevan.

Migrasi Teknis: Salah satu tahap penting dalam penataan ulang frekuensi adalah migrasi teknis. Operator harus memodifikasi peralatan mereka agar sesuai dengan alokasi frekuensi yang baru. Ini melibatkan penyesuaian antena, pemrograman perangkat, dan perubahan infrastruktur.

Pemantauan dan Pengawasan: Setelah penataan ulang selesai, badan regulasi akan terus memantau penggunaan frekuensi baru untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan dan untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul.

Apa Dampak Refarming?

Penataan ulang frekuensi memiliki dampak yang signifikan dalam dunia telekomunikasi, termasuk:

Peningkatan Kapasitas: Dengan mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi, kapasitas jaringan dapat ditingkatkan. Ini sangat penting mengingat meningkatnya permintaan untuk layanan telekomunikasi.

Peningkatan Kualitas Layanan: Penataan ulang frekuensi dapat memungkinkan operator telekomunikasi untuk mengalokasikan frekuensi yang lebih baik, yang dapat meningkatkan kualitas layanan seperti kecepatan internet dan kejernihan panggilan suara.

Efisiensi Penggunaan Spektrum: Dengan menghindari tumpang tindih dan interferensi, spektrum frekuensi digunakan lebih efisien. Ini dapat mengurangi konflik antara operator dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Kemampuan Inovasi: Dengan alokasi frekuensi yang lebih baik, operator telekomunikasi dapat lebih mudah mengembangkan layanan baru dan inovatif, seperti 5G, yang memerlukan alokasi frekuensi yang lebih tinggi.

Peningkatan Penggunaan Layanan: Dengan jaringan yang lebih kuat dan kualitas layanan yang lebih baik, lebih banyak orang dapat mengakses layanan telekomunikasi, meningkatkan konektivitas di seluruh negara.

Kapan Penataan Ulang Frekuensi Harus Dilakukan?

Penataan ulang frekuensi tidak terjadi secara acak, tetapi bergantung pada faktor-faktor tertentu, seperti:

Perkembangan Teknologi: Kemajuan teknologi yang memerlukan lebih banyak kapasitas spektrum frekuensi atau perubahan dalam alokasi frekuensi dapat memicu penataan ulang.

Peningkatan Permintaan Layanan: Jika permintaan untuk layanan telekomunikasi terus meningkat, penataan ulang frekuensi mungkin diperlukan untuk mengakomodasi pertumbuhan ini.

Perubahan Kebutuhan Pengguna: Perubahan dalam perilaku pengguna, seperti peningkatan penggunaan data seluler, dapat mempengaruhi alokasi frekuensi.

Ketersediaan Spektrum yang Terbatas: Di wilayah dengan spektrum frekuensi yang terbatas, penataan ulang mungkin diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan.

Mengapa Perlu Penataan Ulang Frekuensi?

Penataan ulang frekuensi merupakan tindakan yang sangat penting dalam dunia telekomunikasi modern, dan ada beberapa alasan kuat mengapa hal ini diperlukan:

Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya: Penataan ulang frekuensi memungkinkan penggunaan yang lebih efisien dari spektrum frekuensi yang terbatas.

Mendukung Pertumbuhan Teknologi: Penataan ulang frekuensi dapat mendukung pengembangan teknologi baru seperti 5G, yang memerlukan alokasi frekuensi yang lebih tinggi.

Meningkatkan Kualitas Layanan: Dengan mengalokasikan frekuensi yang lebih baik, kualitas layanan telekomunikasi dapat ditingkatkan, memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna.

Kemampuan Inovasi: Penataan ulang frekuensi memberikan kesempatan untuk mengembangkan layanan baru dan inovatif yang dapat memajukan industri telekomunikasi.

Kepatuhan dengan Standar Internasional: Penataan ulang frekuensi dapat memastikan bahwa negara-negara mematuhi standar internasional dalam pengelolaan spektrum frekuensi, memfasilitasi kompatibilitas global.







Tingkatkan Kualitas Layanan Telekomunikasi

Kominfo Tuntaskan Refarming Pita Frekuensi Radio

**Manfaat refarming tersebut
terkait dengan perbaikan
kualitas layanan agar terciptanya
optimalisasi penggunaan spektrum
frekuensi radio,**

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelesaikan penataan ulang atau refarming pita frekuensi radio 2,3 GHz di beberapa provinsi. Proses penataan ulang berlangsung selama 17 hari kalender yang dimulai pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 berawal dari cluster 1 yang mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan telah tuntas pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 di cluster 6 yang mencakup wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Direktur Penataan Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Denny Setiawan menyatakan, dalam penataan ulang itu ada dua penyelenggara jaringan bergerak seluler yang ikut terlibat.

"PT Smart Telecom dan PT Telekomunikasi Selular) yang menjadi pemegang Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) pada pita frekuensi radio 2,3 GHz. Adapun jumlah site yang telah dilakukan refarming pita frekuensi radio 2,3 GHz adalah sebanyak 6.046 site," tuturnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (28/03/2023).



PT Smart Telecom dan PT Telekomunikasi Selular) yang menjadi pemegang Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) pada pita frekuensi radio 2,3 GHz. Adapun jumlah site yang telah dilakukan refarming pita frekuensi radio 2,3 GHz adalah sebanyak 6.046 site

Penataan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,3 GHz dilakukan sebagai tindak lanjut atas persetujuan pengalihan hak penggunaan dari PT Berca Hardayaperkasa kepada PT Telekomunikasi Selular (SIARAN PERS NO. 511/HM/KOMINFO/11/2022 tanggal 16 Februari 2022).

Penataan sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun

2020 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz pada Pasal 6, dalam hal terdapat penetapan izin Pita Frekuensi Radio yang tidak saling berdampingan (non-contiguous), maka penataan ulang (refarming) wajib dilakukan. Sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi, terdapat penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz yang tidak berdampingan (non-contiguous) sebagaimana divisualisasikan pada gambar 1.



Menurut Direktur Denny Setiawan, refarming sempat menemui kendala teknis pada awal pelaksanaan. Kondisi itu membuat jadwal refarming sedikit tertunda penyelesaiannya pada tanggal 25 Maret 2023 dari yang semula ditargetkan selesai pada tanggal 17 Maret 2023.

“Ada kendala sehingga perlu dilakukan perubahan jadwal dan cluster. Dengan koordinasi yang baik kendala tersebut dapat diatasi. Refarming ini merupakan refarming yang penyelesaiannya paling cepat dari beberapa refarming yang pernah dilakukan sebelumnya,” jelasnya.

Dengan berakhirnya refarming pita frekuensi radio 2,3 GHz, maka kondisi penetapan IPFR 2,3 GHz sudah berdampingan (contiguous). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Dalam melakukan refarming, Kementerian Kominfo bersama operator pelaksana memilih jadwal kegiatan pada tengah malam.

“Untuk meminimalkan potensi gangguan layanan pada masyarakat yaitu dimulai sekitar pukul 23.00 waktu setempat sampai pukul 03.00 keesokan harinya,” tandas Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo.

Selama proses refarming berlangsung, Kementerian Kominfo melalui UPT Balai/Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio juga telah melakukan monitoring di lapangan.

“Untuk memastikan proses pemindahan frekuensi berjalan sesuai dengan skenario yang ditetapkan dan menghindari terjadinya interferensi,” tegas Direktur Denny Setiawan.

Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo menyatakan penetapan pita yang berdampingan (contiguous) pada pita frekuensi radio 2,3 GHz akan memberikan banyak keuntungan dan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha pengguna layanan seluler.

“Manfaat refarming tersebut terkait dengan perbaikan kualitas layanan agar terciptanya optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio,” ujarnya.

Menurut Direktur Denny Setiawan, dengan pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara optimal, maka kapasitas jaringan seluler pun akan turut meningkat sehingga mampu mengimbangi pertumbuhan traffic data yang terus bertumbuh

pesat dan adanya potensi terjadi kepadatan jaringan (network congestion) di beberapa titik.

“Hal ini tentunya juga akan meningkatkan kecepatan akses internet mobile broadband yang dapat dinikmati oleh masyarakat terutama dalam mempersiapkan kualitas layanan seluler pada saat rangkaian libur hari raya Idul Fitri mendatang,” jelasnya.

Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo menjelaskan refarming sudah dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

“Dengan berakhirnya refarming 2,3 GHz ini, seluruh alokasi frekuensi yang digunakan oleh operator- operator seluler di Indonesia telah tertata dengan baik di mana seluruhnya telah berdampingan (contiguous),” tandasnya.

Targetkan Peningkatan Kualitas Layanan

Penataan ulang frekuensi dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi melalui optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio.

Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo menegaskan manfaat refarming untuk perbaikan kualitas layanan yang dapat dinikmati oleh pelanggan.

Menurutnya, dengan pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara optimal, maka kapasitas jaringan seluler pun akan turut meningkat sehingga mampu mengimbangi pertumbuhan traffic data yang terus bertumbuh pesat.

“Termasuk di sejumlah titik saat ini terjadi kepadatan jaringan (network congestion). Baik itu layanan 4G maupun 5G terlebih pita frekuensi radio 2,3 GHz merupakan salah satu capacity band dengan bandwidth yang lebar,” tuturnya.

Direktur Denny Setiawan menyatakan dalam penyediaan layanan seluler, Indonesia menerapkan kebijakan netral teknologi berdasarkan pada evolusi standar teknologi International Mobile Telecommunications (IMT) untuk seluruh pita frekuensi radio yang digunakan. Kebijakan netral teknologi tersebut juga berlaku pada pita frekuensi radio 2,3 GHz.

“Dengan kebijakan netral teknologi tersebut, operator seluler dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam memilih teknologi IMT yang akan diimplementasikannya. Selain dapat mengimplementasikan teknologi IMT-Advanced atau yang biasa dikenal dengan istilah 4G (LTE), operator juga dapat menerapkan teknologi IMT-2020 (5G),” jelasnya.

Guna mendukung keberhasilan proses refarming, Kementerian Kominfo melalui UPT Balai/Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio juga berkomitmen melakukan pengawasan dan

Termasuk di sejumlah titik saat ini terjadi kepadatan jaringan (network congestion). Baik itu layanan 4G maupun 5G terlebih pita frekuensi radio 2,3 GHz merupakan salah satu capacity band dengan bandwidth yang lebar,

pengendalian di lapangan terhadap penataan ulang (refarming) pita frekuensi radio 2,3 GHz.

“Salah satunya dengan melakukan kegiatan pemantauan spektrum frekuensi radio di seluruh cluster pada saat proses pemindahan pita frekuensi radio dilakukan mulai dari pukul 23.00 waktu setempat di hari H sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat keesokan harinya, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” jelas Direktur Denny Setiawan.

Tuntaskan Refarming 2,1 GHz di Februari

Sebulan sebelum pelaksanaan refarming pita frekuensi 2,3 GHz, Kementerian Kominfo juga telah menuntaskan proses penataan ulang untuk spektrum frekuensi radio 2,1 GHz.

“Jadi hari ini kita akan menutup seluruh rangkaian refarming 2,1 GHz ini dengan menandatangani Berita Acara yang kemudian akan dilaporkan kepada Bapak Menteri Kominfo Johnny G. Plate, bersamaan dengan pengajuan Rancangan Keputusan Menteri (RKM) penetapan hasil refarming,” ungkapnya dalam Penandatanganan Berita Acara Penyelesaian Refarming Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz, di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat, Rabu (08/02/2022).

Menurut Direktur Denny Setiawan, jika RKM telah ditetapkan, akan dilanjutkan dengan penyesuaian Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) ketiga operator di bagian rentang frekuensi.

“Opsi-opsi skema refarming telah disepakati sebelum lelang dilakukan. Proses refarming kita saya rasa sudah 10 tahun dari 2013, dimulai dengan reformasi operator telekomunikasi antara Axis dengan Smart, terus merger dipotong refarming lagi. Jadi sudah tiga kali refarming kita lelang-cabut, lelang-cabut,” jelasnya.

Proses seleksi pita 2,1 GHz yang dilakukan di tahun 2022 lalu, merupakan langkah percepatan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Dalam proses tersebut, Telkomsel (TSEL) dinyatakan sebagai pemenang seleksi dan kondisinya tidak contiguous dengan penetapan eksistingnya di pita 2,1 GHz.

“Jadi terobosan hari ini adalah kita lakukan lelang, dimulai pada Oktober tahun lalu dan kita lakukan migrasi ini di bulan Desember tahun yang sama sampai Februari 2023, Ini record ya, cepat dan dikurangi masa peraturan baru,” jelas Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo.

Menurut Direktur Denny Setiawan, berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2022 tentang persetujuan merger, Blok 12 dikembalikan maksimal tanggal 3 Januari 2023. Namun, seleksi pita 2,1 GHz tersebut telah selesai di tanggal 27 Oktober 2022. Hal itu ditandai dengan penetapan Kepmen 479/2022 yang menetapkan TSEL sebagai pemenang seleksi.

“ISAT sendiri pun melakukan akselerasi dalam pengosongan Blok 12 dengan menyelesaikannya lebih awal di tanggal 27 Desember 2022,” ungkapnya.

Dengan adanya refarming, maka alokasi semua operator seluler di pita 2,1 GHz menjadi contiguous sehingga lebih optimal dalam menyediakan kualitas layanan yang lebih baik lagi ke masyarakat. Oleh karena itu, Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo mengapresiasi dukungan dan komitmen semua pihak

“Ini membuktikan walaupun teman-teman opsel saling berkompetisi, tetapi untuk tujuan yang sama (memberikan layanan) saling berkolaborasi. Saya berharap, ini sudah menjadi suatu komitmen dan budaya dari para operator seluler. Kami harapkan juga kualitas layanan yang lebih baik termasuk peningkatan speed-nya, mudah-mudahan mendapatkan kapasitas dan coverage-nya,” ungkapnya.



KOLEKSI BUKU BARU PERPUSTAKAAN KOMINFO



Selain judul buku diatas, ada juga terbitan dari pengarang :
Tere Liye, Ika Natassa, Agatha Christie, Almira Bastari, Leila
S. Chudori, Keigo Higashino, Matt Haig, Dee Lestari, C.S
Lewis, Rick Riordan, Enid Blyton, Maman Suherman, Valerie
Patkar, dan lainnya

Layanan Perpustakaan

Senin – Kamis Jam 09.00-15.00

Jumat Jam 09.00-11.30

Jam 13.30-15.30

Akses katalog di

<http://perpustakaan.kominfo.go.id/>

(hanya bisa diakses dari jaringan internal kominfo)

Perpustakaan Kementerian Kominfo

Gedung Belakang Lt 1 Jl. Medan Merdeka Barat No 9, Jakarta Pusat

10TU Jadi Kunci Percepatan Menuju Indonesia Maju 2045

Oleh : Tim Kajian Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio
dalam Mendukung Teknologi Utama untuk Percepatan
Indonesia Maju (HARUKA)

Indonesia telah menetapkan visi jangka panjang “Indonesia Maju 2045” yaitu Indonesia sebagai negara maju pada Tahun 2045. Indonesia dengan level maju adalah ujung dari berbagai usaha segenap anak bangsa, termasuk penataan spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi radio dapat dimanfaatkan oleh negara, sesuai dengan perkembangan teknologinya, untuk memberikan manfaat besar bagi kepentingan nasional menuju kualitas hidup yang tinggi bagi rakyat Indonesia.

Direktorat Penataan Sumber Daya, Direktorat Jenderal Penataan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) bersama dengan Tim Peneliti dari Universitas Telkom telah menyelesaikan Kajian Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio dalam Mendukung Teknologi Utama untuk Percepatan Indonesia Maju (HARUKA) pada Tahun 2022 untuk mengidentifikasi dan memecahkan banyak potensi masalah penting. Salah satu hasil kajian HARUKA ini adalah teridentifikasinya sepuluh teknologi utama (10TU) yang sangat potensial untuk mempercepat Indonesia Maju 2045 dan harus dikuasai bangsa Indonesia.

10TU adalah teknologi penting yang diharapkan dapat menjadi enabler technology bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup Indonesia menuju Indonesia Maju 2045. Identifikasi 10TU ini telah mempertimbangkan urgensi teknologi yang menghasilkan arah pengembangan teknologi yang terbagi ke dalam 3 (tiga) fase sebagai berikut:



Fase Pertama: Penguatan Infrastruktur Terestrial, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat bagi Indonesia Maju melalui teknologi terestrial;

Fase Kedua: Penguatan Infrastruktur Satelit, untuk menjamin komunikasi berkualitas tinggi yang menghubungkan banyak pulau di Indonesia sebagai negara kepulauan;

Fase Ketiga: Penguasaan Sains dan penguatan kedaulatan negara menjadi modal penting atas penguasaan ilmu pengetahuan dan pemahaman lengkap atas wilayah darat, laut, dan udara Indonesia sebagai indikasi Indonesia Maju dalam sumbangsih keilmuan.

Sepuluh Teknologi Utama (10TU) untuk Percepatan Indonesia Maju 2045



10TU yang ditunjukkan pada Gambar 1, yaitu: (1) International Mobile Telecommunication (IMT-2020) 5G-NR, 5G-Advanced, dan IMT-2030 (6G); (2) Wireless Fidelity (WiFi) 6E/7; (3) Railway Radiocommunication System between Train and Tracksides (RSTT); (4) Intelligent Transportation Systems (ITS); (5) Unmanned Aerial Systems (UAS); (6) Satellite Technologies (HTS, IoT, Quantum, Hybrid, ESIM); (7) Wireless Power Transfer (WPT); (8) High Altitude Platform Systems (HAPS) dan termasuk HAPS as IMT Base Station (HIBS); (9) Automatic Identification Systems (AIS) dan Global Maritime Distress and Safety Systems (GMDSS), dan (10) Earth Exploration Satellite Services (EESS), harus dipersiapkan dan dikuasai oleh Indonesia dengan persiapan dan alokasi spektrum frekuensi radio seoptimal mungkin untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Bangsa Indonesia.

TU1: IMT-2020 5G-NR, 5G-Advanced, dan IMT-2030 (6G) dan TU2: WiFi 6E/7 penting untuk peningkatan keterjangkauan dan kapasitas akses. TU3: RSTT sebagai salah satu solusi transportasi massal masa depan, penting untuk memberikan layanan transportasi yang aman dan nyaman di pulau-pulau besar Indonesia. TU4: ITS sebagai bagian dari smart city masa depan diperlukan untuk meningkatkan ekonomi dan efisiensi di kota. TU5: UAS diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi logistik dengan memanfaatkan jaringan terestrial di angkasa dan banyak kemungkinan penerapan lainnya.

TU6: advanced satellite technologies penting untuk memperkuat infrastruktur angkasa Indonesia sebagai negara kepulauan yang memanfaatkan komunikasi antariksa yang aman. TU7: WPT sebagai salah satu transfer energi fleksibel masa depan, harus dikembangkan kemandiriannya untuk mewujudkan Indonesia yang maju, efisien, dan serba otomatis dalam masyarakat digital. TU8: HAPS and HIBS dan TU9: AIS and GMDSS untuk memperkuat keamanan wilayah maritim Indonesia. TU10: EESS diharapkan menjadi sarana kontribusi Indonesia di bidang sains dan teknologi untuk mendukung eksplorasi bumi dan ruang angkasa di masa depan.

10TU ini juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo 2020-2024 dan diharapkan juga selaras dengan Renstra Kemenkominfo 2025-2029 mendatang, terutama dalam perluasan layanan akses, peningkatan infrastruktur digital, dan penyediaan internet yang aman dan andal. Selain itu, 10TU juga menjadi landasan untuk mendukung transformasi digital di semua sektor strategis, sesuai arahan Presiden RI. 10TU ini akan sukses dengan dukungan kolaborasi pentahelix yang kuat antara akademisi, industri, pemerintah, komunitas/masyarakat, dan media.



Indonesia Bawa Pulang Piala Penghargaan WSIS 2020 untuk GNLD Siberkreasi

Setelah tertahan selama dua tahun di Swiss akibat pandemi, Indonesia membawa pulang piala penghargaan Champion World Summit on the Information Society (WSIS) 2020 untuk Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi. Penghargaan itu merupakan apresiasi atas upaya Pemerintah Republik Indonesia bersama komunitas di tingkat nasional dari International Telecommunication Union (ITU) dan komunitas internasional.

"Mewakili pemerintah Indonesia, saya mengapresiasi Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi yang terpilih menjadi salah satu winner WSIS Prizes 2020 untuk Kategori 4 — AL C4. Semoga dengan pencapaian itu menunjukkan Indonesia merupakan bangsa yang unggul dalam bidang TIK di dunia," ujar Direktur Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Boni Pudjianto dalam WSIS Forum 2023 di Jenewa, Swiss, Rabu (15/03/2023).

GNLD Siberkreasi yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2021, mendapatkan penghargaan atau champion untuk kategori Action Lines WSIS C4 Capacity Building Forum WSIS Prize



2020. Gerakan itu menjadi salah satu upaya untuk mengajak masyarakat lebih produktif di ruang digital. Dengan memberikan pelatihan kecakapan digital dari tingkat dasar untuk menjangkau masyarakat di seluruh tanah air.

Menurut Direktur Boni, ITU berencana menyerahkan penghargaan pada September 2020 yang lalu. Namun, pandemi akhirnya membuat penyerahan penghargaan berlangsung secara daring.

"Piala kemenangan tersebut tertahan di Kantor ITU. Jadi kali ini penjemputan piala kemenangan WSIS 2020 baru bisa berlangsung tahun ini untuk dibawa pulang ke tanah air," jelasnya.

Menurut Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, Siberkreasi terpilih menjadi pemenang setelah mengikuti seleksi di antara 762 inisiatif atau karya dari mancanegara yang terdaftar. Dalam WSIS Prizes 2020 kali ini, terdapat 762 karya atau inisiatif yang terseleksi.

"Dari jumlah tersebut, terdapat 72 nominator pemenang atau "Champion" dan 18 pemenang utama atau "Winner" yang berasal dari berbagai penjuru dunia," tutur Boni Pudjianto

Menurut Boni, terpilihnya Siberkreasi menjadi satu dari lima pemenang dalam WSIS Prizes 2020 karena gerakan itu merupakan inisiatif yang bekerja sama secara kolaboratif dengan Kominfo dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperkuat dampak positif dari penggunaan teknologi.

"Hasil kolaborasi semua pihak itu akan menginspirasi setiap upaya literasi digital guna menutup kesenjangan digital. Saya harap penghargaan itu dapat menginspirasi banyak pihak, bukan hanya komunitas saja tetapi juga individu pribadi," harapnya.

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah penduduk tersebut penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang pada tahun 2022. Jumlah tersebut telah meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 16,5 juta. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa hanya 7,6 juta dari 17 juta penyandang disabilitas usia produktif yang bekerja. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal ini Kemenkominfo memprakarsai program Literasi Digital inklusif bagi penyandang disabilitas.

Direktur Pemberdayaan Informatika, Boni Pudjianto dalam workshop ini menyampaikan bahwa kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas telah menjadi agenda negara dalam beberapa

tahun belakang ini. “Saat ini pemerintah telah melakukan strategi pentahelix (dari hulu ke hilir) untuk menanggapi isu ini. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mewujudkan inklusivitas bagi para penyandang disabilitas adalah dengan melakukan literasi digital,” tambah Boni.

Selain itu, juga ditekankan bahwa Kemenkominfo telah melakukan beberapa kegiatan Literasi Digital yang difokuskan untuk membantu penyandang disabilitas. “Dalam kegiatan literasi digital, kami juga mengajak panelis yang berlatar belakang disabilitas agar lebih bisa memberikan pemahaman terhadap kelompok penyandang disabilitas. Salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah kelas podcast untuk penyandang disabilitas dan beberapa kegiatan lainnya,” tutur Boni.

Sebagai Wadah Kolaborasi Literasi Digital Indonesia, GNLD Siberkreasi didirikan pada Oktober 2017. Hingga kini Gerakan itu telah melakukan kegiatan edukasi literasi digital di 442 lokasi, memberikan pelatihan kepada 3137 Pramuka Digital menjadi relawan literasi digital. Tercatat, sebanyak 180.000 peserta aktif yang telah mengikuti workshop literasi digital Siberkreasi, produksi beragam materi literasi digital yang telah diunduh lebih dari 180.000 kali dari 73 buku seri Literasi Digital yang tersedia gratis untuk umum, menjangkau 75 juta penduduk Indonesia melalui media arus utama dan media sosial, serta telah menghasilkan lebih dari 700 pembuat konten tingkat pemula maupun menengah).

Forum WSIS merupakan platform lintas pemangku kepentingan di bidang TIK yang bernaung di bawah PBB. Setiap tahunnya, ribuan pegiat TIK dari berbagai latar belakang dan asal negara berkumpul di markas besar International Telecommunication Union (ITU).

Pada tahun 2020, ada lima proyek peningkatan kapasitas yang mendapat penghargaan sebagai champion, yaitu GNLD Siberkreasi dari Indonesia, Apps and Girls dari Republik Persatuan Tanzania, GoGeek dari Universitas Raja Khalid Arab Saudi, Robotito inisiatif dari Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) Argentina, dan Camp Pelatihan Keterampilan Digital Pertama dari Pakistan.



Mewakili pemerintah Indonesia, saya mengapresiasi Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi yang terpilih menjadi salah satu winner WSIS Prizes 2020 untuk Kategori 4 — AL C4.





Tahun ini ada 24 nominasi WSIS Prize dari Indonesia, antara lain: BAKTI Inclusive Digital Ecosystem Actions for SDG (IDEA4SDG), SATUSEHAT (Indonesia Health Services Platform), Jakarta Satu: One Map, One Data, One Policy, Jaklapor: Privacy-Preserving Online Public Complaint Application, BAKTI Impact Adventures, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital (National Movement of 1000 Digital Startup), Kampung Penggerak Literasi TIK Madiun (Madiun Village ITC Empowerment), The National Public Service Complaints and Management System – the People’s Online Aspiration and Complaint Service, BAKTIDesa.id, BAKTI One Heart (SEHATI), Strengthening Capacity for Development of Access to Agriculture Information on Irrigation and Marketing Application, JSC Data Science Trainee, dan Master Data Management for Citizen 360 Profiling.

Selanjutnya, BAKTI Business Digital for Disability (BISA), Belajar Mandiri Cerdas Terdidik, Jakarta Smart City Living Lab, Koran Sekolah Digital, Podcast Talkshow Literat, Jujur dan Kreatif (Literate, Honest and Creative Talkshow Podcast), Talkshow Literasi Teknologi Informasi Komunikasi Suara Madiun (Voice of Madiun Literacy ICT Talkshow), Internet Radio for Diversity, 20.000+ Digital Literacy Movement: Indonesia Makin Cakap Digital, Inclusive Digital Literacy to Empower People with Disabilities, Remaja Penggerak Literasi TIK Madiun (The Youth ITC Empowerment Literacy Madiun), dan Smart Change: Collaboration for Sustainable Urban Development.





Pengambilan Sumpah Jabatan CPNS Kemenkominfo

Sebanyak 438 Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil sumpah jabatan pada Rabu, 01 Maret 2023. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo Imam Suwandi mendorong PNS untuk selalu siap sedia melayani masyarakat dengan sepenuh hati sebagai penerapan nilai dasar ASN yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau BerAKHLAK.

“Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil (PNS) dimaknai sebagai kesediaan untuk mengikatkan diri sebagai aparatur pemerintah, abdi negara dan juga abdi masyarakat. Jadilah abdi negara dan masyarakat yang melayani, bukan dilayani,” tegasnya dalam Pengambilan Sumpah Janji PNS Formasi Umum dan Pelantikan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Kementerian Kominfo di Aula Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Kominfo, Jakarta Barat.

Janji sebagai pegawai negeri sipil merupakan penerapan core value ASN BerAKHLAK. Oleh karena itu, Kabiro Imam Suwandi menekankan agar PNS di lingkungan Kementerian Kominfo berkomitmen meningkatkan kedisiplinan budaya kerja sesuai aturan yang berlaku.

“Sebuah kondisi yang tentu saja memberikan konsekuensi logis bagi PNS, untuk berkomitmen dalam menghindari segala larangan dan meningkatkan kedisiplinan budaya kerja, sebagai salah satu bentuk kewajiban sekaligus melaksanakan amanah PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” jelasnya.

Kabiro Kepegawaian dan Organisasi Setjen Kementerian Kominfo menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada PNS yang baru mengambil sumpah.





Antusiasme Tinggi, Peserta Digital Talent Scholarship Wilayah Jatim dan NTB Lampaui Target

Oleh:

Eka Handayani

Kepala Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Surabaya

Tingkat capaian jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS) di tahun kemarin (tahun 2022) khususnya di wilayah kerja Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BPSDMP) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Surabaya yang meliputi wilayah Jawa Timur (Jatim) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) melebihi target yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 BPSDMP Kominfo Surabaya tingkat capaian untuk jumlah peserta pelatihan digital adalah 112,17%, di mana jumlah target peserta adalah 5.900 orang dengan capaian peserta 6.618 orang.

Pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS) yang sudah terselenggara sampai dengan Maret 2023 khususnya di wilayah kerja Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BPSDMP) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Surabaya antara lain 8 pelatihan program *Vocational School Graduate Academy (VSGA)*, 2 pelatihan program *Thematic Academy (TA)*, 17 pelatihan program *Digital Entrepreneurship Academy (DEA)* dan masih banyak lagi waiting list dari beberapa mitra baik Pemerintah daerah (Pemda), Perguruan Tinggi (PT) ataupun komunitas yang mengajukan permohonan untuk dapat bekerjasama dalam menyelenggarakan pelatihan DTS di wilayah mereka.

Dari data diatas menggambarkan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi terhadap pelatihan DTS. Hal ini disebabkan karena pelatihan DTS merupakan peluang bagi beberapa daerah/komunitas untuk mengembangkan kompetensi talenta digital guna mendukung target pengembangan SDM di wilayah mereka. Peserta yang mengikuti pelatihan DTS telah banyak dibekali dan menggali berbagai keterampilan dibidang teknologi informasi dan komunikasi baik peserta dari kalangan angkatan kerja muda, masyarakat umum serta aparatur sipil negara sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing dan memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang teknologi.

Peserta pelatihan pada berbagai akademi terlihat antusias dalam mengikuti pelatihan, dapat dilihat dari keaktifan saat proses pemberian materi dilaksanakan. Sebagian besar peserta pelatihan terlihat sangat proaktif dalam proses pelatihan sehingga diharapkan bisa memaksimalkan diri selama kegiatan pelatihan berlangsung. Beberapa diantara mereka mengaku beruntung dapat terdaftar di web digitalent.kominfo.go.id walaupun status mereka masih seleksi.

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang begitu massif dapat menawarkan ancaman sekaligus tantangan ketika masyarakat hanya menjadi penonton yang pasif dari akselerasi perubahan yang ditimbulkan oleh revolusi dalam bidang Teknologi Informasi (TI). Sehingga tingkat kesadaran masyarakat dalam bidang literasi digital meningkat. Dalam pelatihan DTS ini, peserta tidak hanya dibekali materi saja, akan tetapi peserta juga mendapatkan

outcome yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung. Salah satu contohnya pelatihan pada Digital Entrepreneurship Academy dimana peserta UMKM diberi pendampingan pasca pelatihan selama minimal 28 hari setelah pelatihan tersebut UMKM sudah bisa

mengantongi Nomor Izin Berusaha (NIB) bahkan pengurusan sertifikasi halal, selain itu beberapa benefit yang didapatkan antarlain pemanfaatan media sosial dan ecommerce beserta analisis dan kontennya.

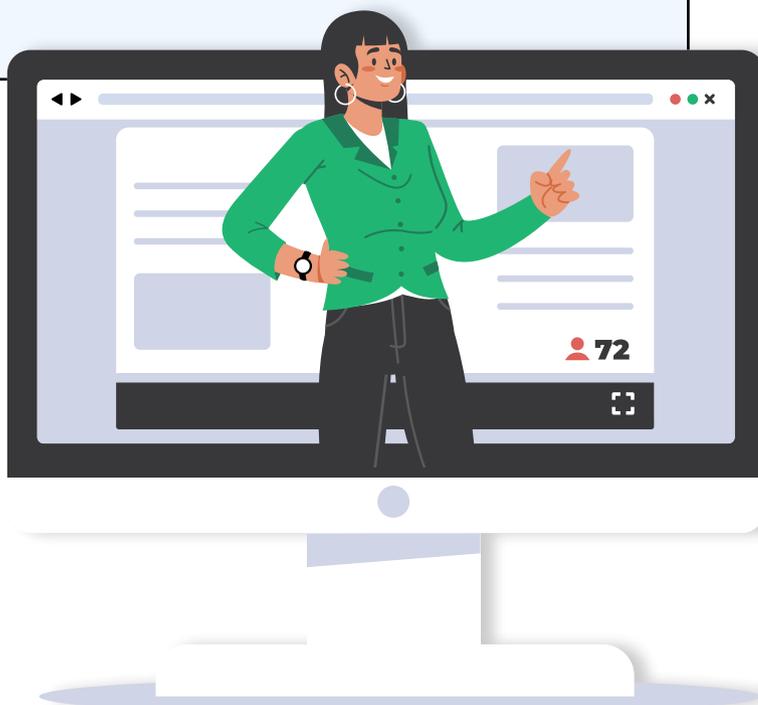
Target Peserta Tahun 2023

Di tahun 2023 terdapat peningkatan target peserta namun juga terdapat penurunan target anggaran yang cukup signifikan. Hal ini membuat penyelenggara khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah berupaya untuk mengoptimalkan anggaran yang ada

supaya program DTS tetap bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat secara lebih luas dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah tabel perbandingan target peserta tahun 2022 dan 2023.

Academy	Target Tahun 2022 (Jumlah Peserta)	Target Tahun 2023 (Jumlah Peserta)
Vocational School Graduate Academy (VSGA)	1,250	1,300
Thematic Academy (TA)	750	800
Digital Entrepreneurship Academy (DEA)	2,000	2,000
Fresh Graduate Academy (FGA)	-	200
Government Transformation Academy (GTA)	-	600
Total	4,000	4,900

Sumber : BPSDMP Kominfo Surabaya



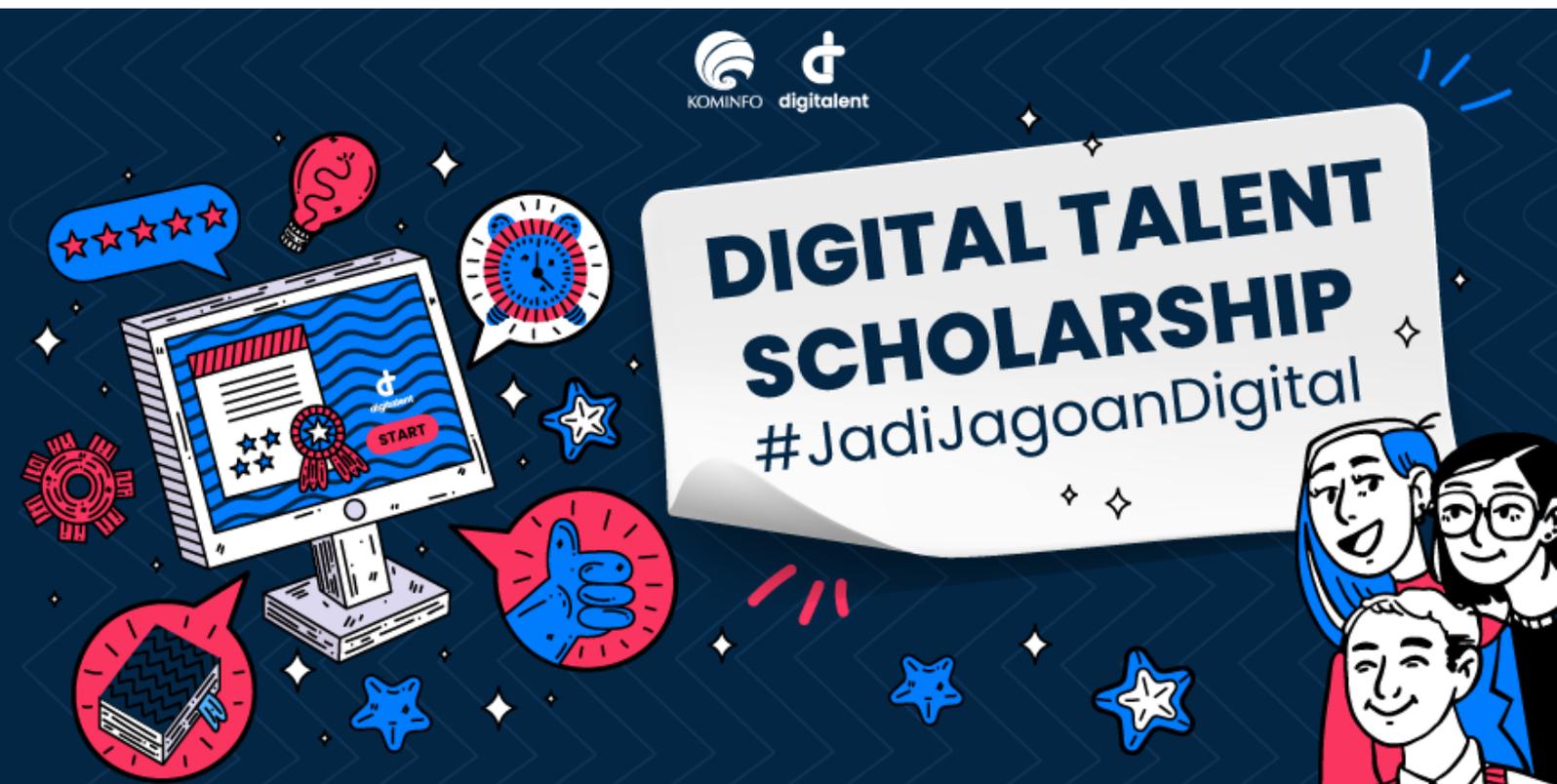
Dari tabel di atas, terdapat penambahan jumlah target peserta dan akademi. Sebelumnya di tahun 2022 dua akademi yaitu GTA dan FGA dilaksanakan oleh pusat Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo namun ditahun ini dua akademi tersebut dilaksanakan oleh UPT.

Di BPSDMP Kominfo Surabaya sampai dengan Maret 2023 masih memaksimalkan permintaan dari mitra (Pemda/Komunitas) untuk menyelenggarakan akademi DEA, TA dan VSGA namun tidak menutup kemungkinan akademi GTA dan FGA akan diselenggarakan setelah bulan April 2023. Beberapa mitra GTA dan FGA juga sudah siap bekerja sama dan masuk pada list jadwal perencanaan kegiatan selanjutnya.

Tingginya antusiasme masyarakat di tahun 2023 ini tentu tidak semua dapat diakomodir pelaksanaannya karena adanya keterbatasan

anggaran yang ada. Dengan melakukan beberapa penghematan pada komponen-komponen tertentu sehingga diharapkan pelatihan DTS dapat dilaksanakan secara optimal. Namun meskipun demikian tetap tidak mengurangi kualitas materi yang diberikan kepada peserta.

Perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pelatihan DTS terus menerus dilakukan, dari mulai sistem pendaftaran yang semakin mempermudah peserta dan tampilan website yang user friendly hingga output peserta yang bukan hanya sekedar pelatihan saja melainkan juga membawa dampak yang lebih baik bagi mereka. Kedepannya semoga DTS dapat terus educate masyarakat di bidang digital yang terus berkembang secara masif, sehingga transformasi digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara sustainable dan merata.





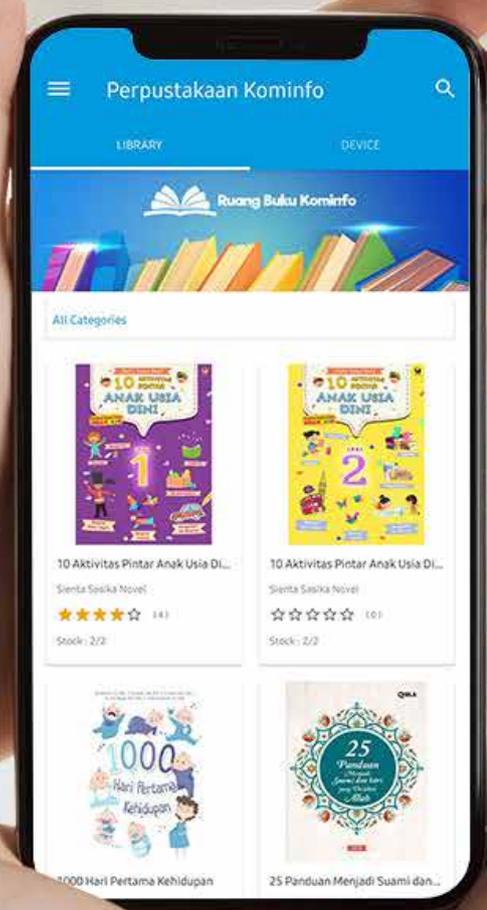
KOMINFO



Ruang Buku
Kominfo

Mari Gemar Membaca!

bersama Ruang Buku Kominfo



Download on the
App Store



GET IT ON

Google Play



Kominfo Perkuat Keterampilan dan Budaya Digital Lewat FGA-DTS

Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan beasiswa pelatihan non-gelar lewat Fresh Graduate Academy (FGA) dalam Program Digital Talent Scholarship (DTS). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo Hary Budiarto menyatakan, pelatihan FGA dirancang untuk menjawab kebutuhan akan SDM digital berkualitas di semua sektor strategis.

"Keterampilan digital menjadi sangat penting di era digital seperti sekarang ini, karena hampir semua bidang membutuhkan penggunaan teknologi, digital, dan internet. Oleh karena itu, memiliki keterampilan digital dan penguasaan budaya digital yang baik sangat membantu dalam mencari pekerjaan, memajukan bisnis, juga membantu untuk lebih produktif dan efisien dalam bekerja," tuturnya dalam Pembukaan Program Pelatihan Bootcamp FGA Batch I Tahun 2023 di Bekasi, Senin (20/03/2023).

Menurut Kabalitbang SDM Hary Budiarto, pelatihan FGA maupun pelatihan lainnya di DTS telah menjangkau masyarakat sejak tahun 2018. Program tersebut menjadi bagian dari Peta Jalan Indonesia Digital Tahun 2021-2024 sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat transformasi digital.

"Salah satu arahan Presiden Jokowi tentang transformasi digital yaitu menyiapkan talenta bidang digital. Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan dengan hadirnya program ini, sehingga dari pimpinan terus mendorong untuk dilaksanakan sampai saat ini," jelasnya.

Secara umum, melalui Program DTS Kementerian Kominfo memiliki target untuk mempersiapkan 9 juta talenta digital yang dibutuhkan dalam mendukung transformasi digital Indonesia.

"Tahun 2023 ini kami Balitbang SDM Kominfo memiliki target untuk melatih 100 ribu talenta digital Indonesia melalui 8 academy, yaitu Fresh Graduation Academy (FGA), Profesional Academy



(ProA), Vocational School Graduate Academy (VSGA), Talent Scouting Academy (TSA), Digital Entrepreneurship Academy (DEA), Thematic Academy (TA), Government Transformation Academy (GTA), dan Digital Leadership Academy (DLA)," jelas Kabalitbang SDM Kementerian Kominfo.

Lewat pelatihan FGA, Kementerian Kominfo melatih peserta dan menyediakan peluang sertifikasi global bidang digital secara gratis. Bahkan, Kementerian Kominfo juga membuka link and match dengan partner atau mitra yang membutuhkan tenaga kerja digital kompeten dan berdaya saing di dalam maupun di luar negeri.

Kabalitbang SDM Hary Budiarto mengajak peserta FGA mengambil kesempatan tersebut dengan baik dan mengikuti proses pelatihan dari mitra hingga tahap akhir.

"Peserta yang hadir di acara hari ini patut bersyukur dan berbangga karena sudah terpilih sebagai peserta yang mendapat kesempatan emas mengikuti Program Bootcamp FGA Batch 1 Tahun 2023. Silahkan hal ini dimanfaatkan dan diikuti secara maksimal, utamanya semoga keterampilan yang diperoleh, portofolio dari praktek-praktek yang dibangun selama pelatihan, juga sertifikat uji kompetensi bagi yang lulus bisa dijadikan bekal untuk modal bekerja di perusahaan tempat di mana ditempatkan atau bisa juga digunakan untuk kepentingan lain yang bermanfaat," tuturnya.

Melalui pelatihan FGA, peserta juga akan mendapatkan manfaat tentang keterampilan baru,

kemampuan untuk bekerja dengan teknologi yang lebih baik, serta lebih siap menghadapi tantangan dalam era digital.

"Kami mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja sama para perusahaan mitra yang telah mendukung program DTS, khususnya di program Bootcamp FGA yang terlaksana sejak tahun 2022 kemarin. Kami yakin, kedepan kita dapat semakin berkontribusi untuk mengembangkan talenta digital potensial dan mencetak jagoan digital Indonesia di masa yang akan datang," ungkap Kabalitbang SDM Hary Budiarto,

Pembukaan Bootcamp FGA Batch I dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Badan Litbang SDM Hedi M. Idris, Ketua Sub-Pokja Program FGA-DTS Eyla Alivia Maranny, serta perwakilan dari dua mitra yakni Division Manager Head of Metrodata Academy Marlina Je dan Human Capital Management General Manager Master System Infotama Andreas Teguh.



Optimalkan Diseminasi Informasi PDP, Kominfo Ajak Sinergi Humas Pemerintah

Pemerintah terus mendorong semua pihak untuk menerapkan pelindungan data pribadi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lewat beragam forum dan diskusi, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak praktisi humas di kementerian dan lembaga untuk meningkatkan sinergi dalam menyebarkan informasi mengenai arti penting pelindungan data pribadi.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan sinergi seluruh unsur pemerintah,

terutama humas kementerian dan lembaga diperlukan agar proses diseminasi informasi melalui kanal informasi yang dimiliki oleh setiap instansi bekerja optimal.

“Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk senantiasa menjaga sinergitas tersebut adalah melalui kegiatan Forum Tematik Bakohumas. Forum ini berperan strategis dalam sharing informasi kebijakan strategis antar anggotanya,” ujar Dirjen Usman Kansong dalam sambutan yang dibacakan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama dalam Diskusi Forum Komunikasi Kehumasan di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (14/03/2023).

Dirjen IKP Kementerian Kominfo meyakini, setiap humas kementerian dan



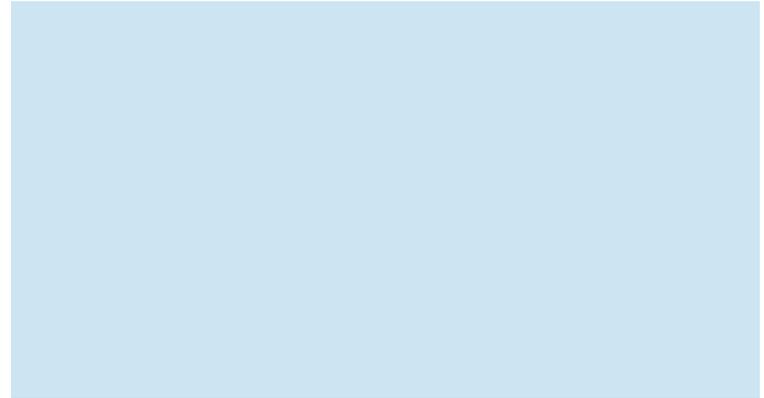
lembaga dapat membantu penyebaran atau diseminasi informasi tentang pentingnya UU PDP kepada masyarakat. Bahkan, dapat menerapkan perlindungan data pribadi dalam memberikan pelayanan secara digital kepada masyarakat.

“Termasuk dalam proses layanan terhadap data pribadi yang disampaikan, sehingga ini menjadi sangat relevan dalam menjaga keberlangsungan layanan secara digital tersebut agar tidak ada data-data pribadi yang bocor maupun dicopy oleh orang lain,” tandasnya.

Mengutip hasil Survei Kementerian Kominfo tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pelindungan Data Pribadi Tahun 2022, Dirjen Usman Kansong menyatakan hampir sekitar 85% masyarakat belum terlalu selektif dalam mengatur akses atas gawai dan aplikasi yang memungkinkan pencurian data pribadi.

Survei yang melibatkan responden sebanyak 11.305 orang di 34 provinsi itu, menunjukkan skor rata-rata tingkat pengetahuan masyarakat pada data pribadi umum yang mencatat 6,7. Sedangkan pengetahuan masyarakat pada data pribadi khusus lebih rendah dengan angka 5,26.

“Ini skalanya 10 jadi masih berada di tengah-tengah. Oleh karenanya, sinergitas dan kolaborasi



Humas Pemerintah membangun kesadaran dan kebiasaan baru untuk menjaga data pribadinya, serta menghormati hak pelindungan data pribadi orang lain sangatlah diperlukan,” jelasnya.

Dalam Forum Komunikasi Kehumasan bertema “UU PDP, Langkah Pemerintah Wujudkan Pelindungan Data Pribadi”, Dirjen IKP Kementerian Kominfo yang juga menjadi Ketua Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) mengharapkan peran aktif humas kementerian dan lembaga untuk menyebarkan substansi materi yang disampaikan oleh narasumber pada kegiatan tersebut.

“Setelah mengikuti forum ini, saya menghimbau kepada bapak/ibu sekalian untuk menyebarkan secara luas dan masif informasi yang dipaparkan oleh para narasumber, dan konten yang disediakan oleh Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada pemangku kepentingan, melalui berbagai kanal yang dimiliki masing-masing kementerian dan lembaga,” ungapnya.

Diskusi Forum Komunikasi Kehumasan menghadirkan narasumber Ketua Tim Tata Kelola PDP Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Hendri Sasmita Yuda dan Information Technology Security Specialist Vaksincom Antonius Alfons Tanujaya. Kegiatan itu dihadiri sekitar 60 peserta perwakilan kementerian dan lembaga.

Cetak Smart Digital Leader Sumut, Kominfo Gandeng University of Cambridge

Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara dan The Møller Institute, University of Cambridge, Inggris telah melaksanakan Program Digital Leadership Academy (DLA) Smart Digital Leader-Sumut Bermartabat.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo Hary Budiarto menyatakan pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pemimpin digital pejabat pimpinan tinggi organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatra Utara.

"Kunci penting dalam transformasi digital bukan hanya pemanfaatan teknologi informasi secara intensif dan masif, namun yang terpenting adalah kesiapan SDM di semua lini. Pelatihan ini menargetkan peningkatan kapasitas peserta sebagai pucuk pimpinan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menginisiasi dan mendorong perubahan menuju akselerasi transformasi digital sebagai program prioritas pemerintah," jelasnya saat menutup Pelatihan Smart Digital Leader di Kantor BPSDM Provinsi Sumatra Utara, Kamis (30/03/2023).



Kabalitbang SDM Kementerian Kominfo menyatakan pelatihan dengan tema Digital Trust and Cybersecurity-The Essential Foundation for Transformation diharapkan dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan keamanan siber, digital trust, satu data dan pemerintahan berbasis elektronik.

"Saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah mengikuti Pelatihan DLA ini



hingga selesai. Apresiasi juga bagi Kepala BPSDM Provinsi Sumut beserta jajarannya, dan tentunya Tim DLA dan para pendamping atas upaya dan kerja keras selama penyelenggaraan Pelatihan ini," ungkapnya.

Hary Budiarto menjelaskan selama satu bulan pelatihan, peserta berhasil merumuskan 14 Rencana Aksi yang terangkum dalam lima area atau sektor yang menjadi tantangan dalam implementasi digitalisasi di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

"Langkah selanjutnya dari rencana aksi adalah implementasi. Kami dari Balitbang SDM akan memonitor progress-nya, karena target pengembangan kompetensi SDM Digital ini bukan hanya terlaksana tapi juga dampak yang dihasilkan kepada kinerja dan pelayanan publik," tandasnya.

Menurut Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Balitbang SDM Kementerian Kominfo, Baso Saleh rencana aksi hasil rumusan peserta antara lain delapan rencana aksi Digitalisasi Layanan Pemerintahan/SPBE, dua rencana aksi Pariwisata Digital, dua rencana aksi Pengembangan SDM, satu rencana aksi Ekonomi Digital dan satu rencana aksi Pengelolaan Data.

"Smart Digital Leader Province–Sumut Bermartabat ini berfokus pada teori, kebijakan, dan praktik mengenai keamanan siber dan kepercayaan digital (cyber security and digital trust). Didukung muatan teknis substansi terkait dengan satu data dan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia guna menambah wawasan isu yang terjadi di Indonesia," jelasnya.

Program DLA merupakan pelatihan digital untuk level pimpinan di sektor publik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan sektor privat. Lewat Program DLA, Kementerian Kominfo berupaya meningkatkan kapasitas pemimpin lembaga publik dan swasta dalam menginisiasi dan mendorong perubahan untuk mendukung akselerasi transformasi digital di Indonesia.

Tahun ini, Program DLA difokuskan dalam tiga skema pelatihan yaitu Smart Digital Leader Indonesia Maju, Smart Digital Leader Semakin Digital dan Smart Digital Leader Province. Dalam penyusunan materi dan pelaksanaan pelatihan, Kementerian Kominfo melibatkan perguruan tinggi terbaik dunia, global technology company dan lembaga internasional.

Dukung Pencapaian SPBE, Kominfo Terima Digital Government Award 2023

Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima Digital Government Award untuk kategori Pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penghargaan itu diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menyatakan Indeks SPBE Indonesia di tahun 2021 berada pada ranking 77 dari 193 negara. Angka itu naik 11 peringkat dari posisi 88 pada tahun 2020.

“Dengan adanya penilaian ini, mendorong dan memberikan inspirasi bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk tetap dapat memajukan SPBE-nya. Jadi terima kasih kepada Kementerian PAN RB sudah menginisiasi kegiatan ini,” ujar Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, usai menghadiri acara SPBE Summit 2023 di Jakarta Pusat, Senin (20/03/2023).

Dirjen Semuel juga mengapresiasi penyelenggaraan Digital Government Award 2023 sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan publik dan administrasi pemerintahan melalui sistem elektronik.

“Ini merupakan sinergi yang dipimpin oleh Kementerian PAN RB sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE Indonesia. Jadi, Digital Government Award adalah perjuangan para pejuang pemerintahan dalam transformasi digital,” jelasnya.

Ajang yang telah berlangsung setiap dua tahun sekali ini akan dilaksanakan setiap tahun. Hal itu menurut Dirjen Aptika Kementerian Kominfo akan sangat bagus untuk mengapresiasi kinerja kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam penerapan SPBE.



“Hari ini Kemenpan RB mengumumkan indeks SPBE yang sudah diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Ke depan, akan digelar setiap tahunnya. Cukup banyak kategori yang akan disampaikan. Ada Award Kategori Penerapan Layanan SPBE, Kategori Pencapaian Indeks SPBE, Kategori Peningkatan Layanan SPBE, Kategori Pencapaian Indeks SPBE, Kategori Penguatan Kebijakan SPBE, Kategori Penguatan Manajemen SPBE,” ungkapnya.

Layanan Terpadu Nasional

Sementara itu, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aptika Kementerian Kominfo menjelaskan dukungan penguatan SPBE dapat disaksikan dalam booth untuk menampilkan capaian program transformasi digital di sektor pemerintahan.

“Booth kami berisikan informasi mengenai Panduan Pemanfaatan Infrastruktur dan Aplikasi Berbagi Pakai SPBE. Hal ini sesuai dengan arahan Bapak

Presiden RI Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pada tanggal 2 Maret 2023, sebagai upaya untuk mendorong komitmen pimpinan instansi pusat dan pemerintah daerah," tuturnya.

Dalam SPBE Summit 2023, Kementerian Kominfo juga mempromosikan layanan terpadu nasional bernama Indonesia Satu.

"Indonesia Satu, merupakan layanan super apps pemerintah agar masyarakat tidak perlu lagi download banyak aplikasi. Dari download banyak menjadi sekali download saja, dari harus login ke banyak aplikasi menjadi cukup sekali login saja. Kemudian, data-data kita juga sudah ada di dalamnya, jadi tidak perlu isi form berkali-kali," jelas Direktur Bambang Dwi Anggono.

Direktur LAIP Ditjen Aptika Kementerian Kominfo menegaskan upaya itu sebagai bentuk dukungan agar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tidak perlu lagi membuat banyak aplikasi terpisah.

"Kami mendorong kementerian, lembaga dan pemerintah daerah menuju pada aplikasi umum, agar kita bisa mewujudkan Satu Data Indonesia, menghasilkan referensi data Indonesia supaya menjadi satu single source of truth," tandasnya.

Berikut daftar 38 kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah yang menerima Digital Government Award dalam enam kategori:

A. Kategori Penerapan Layanan SPBE

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Hukum dan HAM
Komisi Pemberantasan Korupsi
Pemprov Jawa Barat
Pemprov Jawa Timur
Pemprov DKI Jakarta
Pmkab Banyuwangi
Pmkab Kebumen
Pmkab Pesisir Selatan
Pmkot Surabaya

B. Kategori Pencapaian Indeks SPBE

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian PPN/Bappenas
Badan Pusat Statistik
Pemprov Bali
Pmkab Sumedang
Pmkab Bantul
Pmkot Surakarta



C. Kategori Peningkatan Layanan SPBE

Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Komisi Aparatur Sipil Negara
Pmkab Kutai Timur
Pmkot Jambi

D. Kategori Pencapaian Indeks SPBE

Kementerian Keuangan
Badan Standardisasi Nasional
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Pmkab Kulon Progo

E. Kategori Penguatan Kebijakan SPBE

Kementerian Dalam Negeri
Lembaga Administrasi Negara
Pemprov Lampung
Pemprov Bengkulu
Pmkab Garut
Pmkot Denpasar
Pmkot Semarang
Pmkot Banda Aceh
Pmkot Depok

F. Kategori Penguatan Manajemen SPBE

Kementerian Pertanian
Pmkab Polewali Mandar

Jaring Inovasi Digital, Kominfo Buka Seleksi IdenTIK 2023



Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai menggelar Seleksi Nasional Indonesia Entrepreneur TIK (IdenTIK) 2023. Seleksi itu ditujukan untuk mendukung pengembangan start-up dan inovasi digital di Indonesia. Pemenang Kompetisi IdenTIK 2023 akan berkesempatan diikutsertakan ke ajang internasional yaitu Asean ICT Award (AICTA) 2024 mendatang.

Direktur Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Boni W. Pudjianto mengharapkan IdenTIK dapat memberikan inspirasi bagi para entrepreneur di Indonesia untuk terus mengembangkan ide dan inovasi di bidang TIK dan membawa manfaat bagi masyarakat luas.

"Indonesia Entrepreneur TIK (IdenTIK) ini merupakan bagian dari Program Digital Teknopreneur, yang menjadi ajang kompetisi untuk mengidentifikasi karya TIK Anak Bangsa yang kreatif dan memiliki potensi yang luas dalam pemanfaatannya. IdenTIK diharapkan dapat mendorong munculnya karya TIK yang

mampu memberikan solusi sekaligus mendukung transformasi digital," jelasnya dalam acara Kickoff Roadshow Seleksi Nasional Indonesia Entrepreneur TIK (IdenTIK) Tahun 2023 di Kampus BINUS Bekasi, Selasa (07/03/2023).

Melalui IdenTIK, setiap peserta memiliki kesempatan besar bagi para entrepreneur di bidang TIK untuk mempresentasikan ide dan inovasi mereka.

"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi secara aktif dalam acara Kickoff Roadshow ini dan mempersiapkan diri untuk bersaing di kompetisi IdenTIK," ujar Direktur Boni.

Saat membuka kegiatan Seleksi Nasional Indonesia Entrepreneur TIK IdenTIK 2023 secara resmi, Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Kominfo mendorong peserta untuk terus mengembangkan ide dan inovasi bidang TIK.

"Saya berharap agar IdenTIK ini dapat memberikan inspirasi bagi para entrepreneur di Indonesia untuk

terus mengembangkan ide dan inovasi di bidang TIK dan membawa manfaat bagi masyarakat luas," ungkapnya.

Menurut Direktur Boni, Kementerian Kominfo terus berupaya untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. "Dengan kerja sama yang kuat, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat perannya sebagai pemain utama dalam pengembangan teknologi dan masyarakat cerdas di era digital saat ini," tegasnya.

Dengan kolaborasi, akan memungkinkan industri TIK di Indonesia lebih maju dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan para entrepreneur untuk mengembangkan potensi mereka di bidang TIK. Oleh karena itu, Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Kominfo mengapresiasi Bina Nusantara telah memperlihatkan peran aktif dalam mendukung transformasi digital dan perkembangan industri TIK di Indonesia.

"Seperti yang kita tahu Bina Nusantara telah menjadi salah satu universitas terdepan dalam menciptakan kurikulum dan program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar di bidang teknologi informasi dan komunikasi," ungkapnya.

Indonesia Entrepreneur TIK (IdenTIK) merupakan kompetisi tahunan untuk menjangkir karya dan produk TIK sebagai wakil terbaik dari Indonesia untuk bersaing dengan 9 negara lain dalam ajang kompetisi di tingkat ASEAN yakni ASEAN ICT Award. Penghargaan tingkat ASEAN itu merupakan proyek prestius yang disepakati oleh para menteri ICT di negara-negara ASEAN sebagai indikator perkembangan tingkat inovasi dari setiap negara. Ada enam kategori yang dikompetisikan antara lain Public Sector, Private Sector, Inovasi Teknologi Konten Digital, Digital Inclusivity, Digital Start-up dan Digital Innovation.

Dalam acara itu, hadir Juri Digital Inclusivity dari Binus University, Jurike V. Moniaga; Juri Digital Innovation dari ISOC – Jakarta Chapter Yudho Giri Sucahyo, Ketua Dewan Juri IdenTIK 2022 Eko K. Budiardjo, Kepala Bidang e-Government dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi, Arwani, dan Direktur Kampus BINUS Bekasi Gatot Soepriyanto. Hadir pula Pemenang IdenTIK 2022 Firli Herdiana Karya (Website Special Hub) dan Ahmad Aziz (Bottani).

Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Seleksi Nasional Produk TIK "IdenTIK" 2023 dapat mengunjungi website www.identik.id atau Instagram @identik_kominfo.





Susun Publisher Rights, Kominfo Perhatikan Usulan Ekosistem Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah memfasilitasi penyusunan pengaturan tanggung jawab platform digital berkaitan dengan penerapan jurnalisme yang berkualitas di Indonesia. Dalam proses itu, Kementerian Kominfo melibatkan seluruh pemangku kepentingan ekosistem jurnalistik dan digital.

Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Rancangan Peraturan Presiden mengenai Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights itu harus diselesaikan secepatnya.

"Sekarang pembahasan ini pada tataran kelembagaan, tadi pagi jam 9.00 WIB kita masih rapat kita melibatkan Kementerian PANRB. Minta pendapat minta pandangan," jelasnya dalam Konferensi Pers: Dukungan Kesiapan Kominfo pada ASEAN Summit 2023, di Ruang Media Center

Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (24/03/2023).

Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyatakan tengah berupaya menyelesaikan rancangan Perpres secepatnya. Namun, pada saat bersamaan, Kementerian Kominfo juga berupaya mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan.

"Secepatnya akan menyelesaikan ini. Kita juga tidak mau terburu-buru tetapi tidak berkualitas. Sampai sekarang pun masih ada usulan dari organisasi profesi atau asosiasi, misalnya ATVSI dan SMSI. Itu kita bahas juga semuanya," tandasnya.

Menurut Dirjen Usman Kansong, percepatan juga dilakukan setelah Presiden Joko Widodo telah memberikan izin prakarsa untuk



pembahasan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas.

“Akhir Februari kita sudah mendapatkan persetujuan izin prakarsa dari Presiden untuk melanjutkan pembahasan Publisher Rights, dan pembahasan intens terus dilakukan, Kominfo telah membentuk tim antarkementerian dan lembaga dengan anggota dari Setneg, Setkab, Kumham, Kemenko Polhukam, Dewan Pers,” tuturnya

Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyatakan telah menggelar pertemuan dengan pemangku kepentingan dan ekosistem digital.

“Kita juga sudah bertemu dengan platform-platform yang sudah bertemu itu Google kemudian Meta atau Facebook dan Tiktok. Mereka memberikan masukan atas rancangan Perpres tersebut. Tentu saja masukan itu kita bahas,” tuturnya.

Setelah pembahasan selesai, Kementerian Kominfo akan menyerahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi.

“Setelah harmonisasi selesai kemudian siap diserahkan kepada Presiden Untuk ditandatangani kita berharap hari lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah selesai sudah ditandatangani oleh Presiden begitu,” tutur Dirjen Usman Kansong.

Kepada jurnalis yang hadir dalam konferensi pers, Dirjen IKP Kementerian Kominfo menegaskan pembahasan Rancangan Perpres juga memperhatikan peraturan perundangan yang sudah berlaku.



Kamu Ikuti, Kamu Terinformasi

Ikuti Sosial Media Kominfo

-  @Kemenkominfo
-  @kemkominfo
-  Kemkominfo
-  Kemkominfo TV
-  @kemkominfo

Program Menarik Kominfo

- Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy
- TokTok Kominfo
- Kominfopedia
- Netizen Bertanya Kominfo Menjawab
- Kominfo News

Retweet | Share | Like | Follow | Subscribe | Love | Comment

Selamat Memperingati

Hari Raya Nyepi

Tahun Baru Saka 1945

22 Maret 2023

